

## Kasus Penembakan

# Pusat Peluk Kelompok Sipil Bersenjata di Papua



Mamberop Rumakiek

**B**elakangan ini, tepatnya pada 21 Februari 2013, kembali terjadi penembakan terhadap aparat TNI yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata. Delapan anggota TNI gugur dan dua lainnya mengalami luka tembak.

Dalam keterangan persnya, Kapuspen TNI menjelaskan kronologi terkait penyerangan dan penembakan yang dilakukan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) di Tinggi Nambut dan Sinak, Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa bermula pada Kamis (21/2), penembakan dan penghadangan terhadap anggota TNI terjadi di dua lokasi di wilayah Puncak Jaya. Dalam peristiwa itu delapan prajurit TNI gugur.

**Penembakan di Papua ibarat sinetron drama tanpa akhir. Tahun lalu saja terjadi sejumlah peristiwa, antara lain pada bulan Juni, Oktober, September, dan November. Korban jiwa warga sipil dan tentara.**

Pada pukul 09.30 WIT terjadi penyerangan terhadap Pos Maleo Yonif 753/AVT di Distrik Tinggi Nambut. Pelakunya GPK bersenjata dan mengakibatkan dua prajurit TNI tertembak. Lettu Inf Reza Gita Armena tertembak lengan kirinya, sedangkan Pratu Wahyu Prabowo terkena tembakan pada bagian dada sebelah kiri dan meninggal di tempat kejadian.

Berikutnya, pukul 10.30 WIT, terjadi penghadangan terhadap sejumlah anggota Koramil Sinak Kodim 1714 Puncak Jaya. Saat itu mereka sedang berjalan kaki mengambil barang kiriman berupa alat komunikasi di Bandara Sinak yang dikirim dari Nabire.

Akibat penghadangan oleh GPK bersenjata, tujuh anggota TNI gugur, yaitu Sertu M Udin (anggota Koramil Sinak Kodim 1714/PJ), Sertu Frans Hera (Koramil Sinak Kodim 1714/PJ), Sertu Ramadhan Amang (Yonif 753/AVT), Sertu Edi Julian (Yonif 753/AVT), Praka Jojo Wihardjo (Yonif 753/AVT), Praka Wempriat (Yonif 753/AVT), dan Pratu Mustofa (Yonif 753/AVT).

Pada Jumat (22/2), pukul 08.28 WIT, pesawat helikopter jenis Puma TNI AU dengan nomor register HT-3318 ditembaki GPK bersenjata saat

mengevakuasi jenazah di Bandara Sinak. Akibatnya, seorang kru pesawat bernama Lettu Tek Amang Rosadi menderita luka-luka di tangan kiri, sedangkan empat kru lainnya selamat.

Kaca kanan helikopter pecah. Bagian depan pesawat juga terkena tembakan yang menyebabkan autopilot pesawat tidak berfungsi dengan baik. Bahkan, helikopter yang dipiloti Mayor Penerbang Asep Wahyu Wijaya akhirnya memutuskan kembali ke Mulia, Puncak Jaya. Proses evakuasi dilanjutkan, tetapi karena cuaca yang buruk proses evakuasi ditunda hingga esok hari.

Pada Minggu (23/2), seluruh korban dievakuasi ke Jayapura. Dilanjutkan dengan upacara penyerahan jenazah kepada keluarga korban secara militer, yang dipimpin langsung Pangdam Cendrawasih Mayjen TNI Christian Zebua.

### Pembiaran

Pemerhati masalah sosial dan politik Papua yang kini sedang menyelesaikan studi magister ilmu kesejahteraan sosial di FISIP UI, Mamberop Rumakiek, prihatin atas peristiwa-peristiwa penembakan di Papua. Seharusnya pemerintah mengupayakan damai di Papua.

Menurut Mambe, demikian dia akrab disapa, peristiwa itu tidak hanya memakan korban kedua pihak yang bertikai. Acap kali masyarakat sekitar pun turut menjadi korban dan mengalami kekerasan. "Parahnya lagi mereka mengungsi karena takut terkena dampak pertikaian tersebut," ujar pria kelahiran Teminabuan, 16 Maret 1979, ini. Ia kemudian menambahkan, adanya operasi militer selama ini membuat suasana semakin mencekam.

Direktur Hubungan Antar Lembaga LP3RI (Lembaga Pengawas Pejabat Publik Republik Indonesia) ini mengamati konflik di Papua memang sudah berlangsung lama. Sejak Papua berintegrasi dengan NKRI, ada sekelompok masyarakat Papua yang tidak setuju terhadap proses integrasi. Mereka pun melakukan perlawanan, terutama dengan pihak TNI dan Polri hingga kini. Sudah banyak korban berjatuh baik di pihak sipil maupun pihak tentara dan polri.

Siapa kemudian yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pertikaian yang terjadi di Papua? Pihak TNI menuding GPK bertanggung jawab atas terjadinya serangan tersebut. Sementara, menurut Mambe, pemerintah juga mesti bertanggung jawab menciptakan rasa aman lantaran Papua masih bagian dari NKRI.

"Pemerintah memiliki kewenangan menindak mereka dan kalau bisa merangkul kelompok sipil bersenjata tersebut," ujar Mambe yang kini menjadi bakal calon senator (anggota Dewan Perwakilan Daerah) dari Papua Barat. "Apalagi tentara kita lebih canggih peralatan senjatanya. Masa mereka tidak mampu melumpuhkan kelompok sipil yang bergerilya di Papua."

Sekalipun begitu, Mambe heran dan curiga melihat konflik antara pihak keamanan dan gerakan sipil di Papua tidak juga tuntas. Ia menduga kekerasan di Papua sepertinya dibiarkan oleh pemerintah. Sama halnya

dengan pembiaran penyakit AIDS dan persoalan sosial lainnya yang sudah berlangsung lama di Papua.

### Dialog Damai

Pemerintah menggunakan beberapa metode seperti operasi militer, otonomi khusus Papua, dan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) guna meyakinkan sebagian masyarakat Papua. Namun, dalam kenyataan gagal.

Menurut Mambe, apa pun langkah-langkah yang telah diambil pemerintah pusat adalah bagian tugas negara dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Dan tampaknya masyarakat Papua sudah tidak lagi percaya anjuran pemerintah. Ketidakpercayaan rakyat ini merupakan dampak dari pembohongan publik selama ini.

Lebih jauh dia menjelaskan kekerasan yang terjadi di Papua sejak zaman Depera. Kala itu, militer begitu dominan dalam proses pembangunan daerah. Bahkan, Papua sempat dijadikan basis militer. Kini orang Papua tidak lagi mempercayai militer, yang dianggap mewakili kepentingan pemerintah, karena acapkali melakukan kekerasan di Papua. Oleh karena itu, pemerintah pusat sangat sulit memulihkan nama baiknya di mata rakyat Papua.

Pasca reformasi, otonomi daerah diharapkan menghembuskan angin perubahan di Papua. Apalagi otonomi daerah memberikan otoritas lebih besar kepada masing-masing pemerintahan provinsi. Sayangnya, rakyat Papua pun tidak mempercayai pemerintah daerah yang notabene dipimpin oleh orang Papua asli. Apa sebab? Banyak elite orang Papua yang duduk di pemerintahan daerah di Papua terlibat kasus korupsi. Sementara itu, kesenjangan sosial di Papua semakin menganga.

"Kini, orang Papua menjajah daerahnya sendiri," kata Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia periode 2008-2010 ini.

Perilaku pemerintah daerah yang korup ini lagi-lagi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Papua. Mereka tidak percaya terhadap hal apa pun, termasuk tawaran pemerintah tentang program UP4B.

"Rakyat Papua tidak lagi percaya karena sudah terlalu kecewa dari mulai proses integrasi hingga sekarang, dan harus diakui kecurigaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih ada," kata dia.

Berbagai kalangan menilai guna menyelesaikan konflik di Papua diperlukan dialog damai antara pemerintah pusat dengan Papua. Dan pada zaman pemerintahan Gus Dur dialog damai pernah digagas dan terbilang berhasil.

Mambe menilai Gus Dur, yang ketika itu menjabat presiden keempat RI, adalah sosok yang berani berdialog dan memberikan kepercayaan kepada rakyat Papua. Misalnya, Gus Dur membolehkan nama Irian Jaya diganti dengan nama Papua dan mengibarkan bendera kejora.

"Padahal, di masa sebelumnya, pemerintah pusat begitu takut menggunakan nama Papua karena dianggap akan membangkitkan nasionalisme rakyat Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia," kata Mambe.

Gus Dur justru sebaliknya memberikan kepercayaan kepada masyarakat Papua. "Orang Papua kalau diberikan kepercayaan pastilah mereka tidak akan berkhianat," tambahnya. Terkait tawaran dialog damai di Papua, Mambe mengingatkan telah banyak konsep tentang dialog damai yang telah ditawarkan. Sayangnya, dialog yang diharapkan masyarakat Papua itu tidak terwujud lantaran pemerintah pusat sendiri yang tidak berani dan cenderung menghindar.

"Itu artinya pemerintah pusat sekarang tidak percaya dengan masyarakat Papua. Tidak ada kemauan baik dari

pemerintah pusat untuk membangun Papua. Berbeda sekali dengan pemerintahan Gus Dur yang percaya kepada masyarakat Papua dengan melakukan dialog,” tegas Mambe.

Mambe menduga pemerintah menghindari dialog tersebut lantaran takut adanya keinginan sekelompok masyarakat Papua yang menghendaki “Papua Merdeka”. Menurutnya, ketakutan itu tak perlu ada jika pemerintah sejak dulu menyejahterakan masyarakat Papua seperti yang diamanatkan oleh undang-undang dasar.

“Ketika masyarakat Papua hidup sejahtera maka saya sangat yakin tidak ada orang Papua yang ingin melepaskan diri dari NKRI,” katanya.

Komitmen calon pemimpin Indonesia pada Pemilu 2014 menjadi begitu penting dalam rangka menuntaskan konflik berkepanjangan di tanah Papua. Pada Pemilu 1999 komitmen itu mulai ada. Bahkan, isu Papua bergema sampai ke dunia internasional. Memasuki pemilu 2004 dan 2009, tidak ada konsep yang tegas tentang Papua. Ketidaktegasan konsep ini, menurut Mambe, mungkin disebabkan penduduk Papua yang berjumlah 4 juta penduduk ini belum bisa menentukan siapa presiden Indonesia ke depan. “*Bargaining* (posisi tawar) Papua adalah sumber daya alam yang melimpah. Dan dalam perpolitikan nasional,

orang Papua diberikan jabatan sebagai menteri.”

Ke depan, Mambe berharap pemerintah pusat menjamin kedamaian di Papua. Bagi masyarakat Papua yang bergerilya mengangkat senjata diharapkan kembali bergabung untuk membangun Papua. Pihak TNI dan Polisi kiranya tidak lagi sembarangan memuntahkan ‘timah panas’ kepada warga Papua seperti yang terjadi pada mahasiswa Papua yang ditembak tanpa perlawanan dan tidak sesuai dengan protap (prosedur tetap). Kasus ini pun tidak diusut tuntas.

**“Padahal, di masa sebelumnya, pemerintah pusat begitu takut menggunakan nama Papua karena dianggap akan membangkitkan nasionalisme rakyat Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia,”**

“Penembakan itu adalah perbuatan kriminal dan melanggar aturan karena daerah Papua bukanlah daerah perang,” tegas dia.

#### **Melihat Papua dengan Optimistis**

Juru Bicara Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) Amiruddin Al Rahab mengatakan jika melihat persoalan tanah Papua hanya persoalan konflik maka akan sulit menemukan solusinya.

“Lebih baik menyikapi persoalan Papua menatap masa depannya dengan penuh optimis,” ungkap Amiruddin ketika ditemui majalah *Integritas* di ruang kerjanya di gedung BPPT lantai 21 beberapa waktu lalu.

Menurut Amir, demikian dia akrab disapa, saat ini UP4B memiliki beberapa program yang bila dijalankan dengan serius maka akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua yang jauh lebih baik.

“Tak usahlah kita membahas persoalan konflik sampai berlarut-larut. Sebab, persoalan konflik itu ada faktor ketidakpuasan di masyarakat bawah. Nah, persoalan ketidakpuasan itu yang harus kita penuhi,” ucapnya.

Pemantauan Amir, selama ini perkembangan Papua jauh lebih baik. Ruang partisipasi demokrasi dan politik sudah berjalan dengan baik, seperti proses pemilukada dan pemekaran wilayah. Dulu Papua yang luas itu hanya memiliki 9 kabupaten. Sejak era reformasi, Papua sudah memiliki 42 Kabupaten. Selain itu, salah satu poin kebijakan Otonomi Khusus (Otsus Papua) adalah menelorkan kebijakan bahwa pemimpin birokrasi setingkat bupati juga harus putra asli Papua.

Menurut dia, ruang partisipasi demokrasi dan politik di sana maju pesat. Diantaranya, dapat dilihat dari seringnya terjadi demonstrasi dan bertumbuhnya media sampai tingkat kabupaten. Artinya, kemajuan disana sudah sangat maju, sekalipun di sisi lain ruang kesejahteraan belum berjalan maksimal.

“Sebab itulah tatkala ruang kesejahteraan tak berjalan dengan baik maka konflik acap kali terjadi oleh karena ada faktor ketidakseimbangan antara demokrasi dan kesejahteraan,” jelas dia.

Lebih lanjut Amir memaparkan salah satu tantangan tugas UP4B adalah bagaimana membedah persoalan dan mencari solusinya agar ruang demokrasi dan kesejahteraan dapat berjalan selaras. Sebetulnya pemerintah pusat telah menyediakan regulasi dan anggaran dana. Kini, tinggal tugas pemerintah daerah yang melaksanakan program



Amiruddin Al Rahab

pembangunan Papua sesuai dengan regulasi dan dana yang sudah disediakan.

Menurut Amir, saat ini, pemerintah fokus memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua yang berada di wilayah pegunungan tengah Papua. Kehidupan sosial mereka telah lama terisolasi karena faktor geografis. Sementara masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai, kesejahteraannya jauh lebih baik lantaran faktor informasi dan transportasi lebih baik.

“Nah, tugas UP4B tahun ini adalah membenahi infrastruktur transportasi dengan membuka program jalur pegunungan tengah,” kata Amir kemudian menambahkan bahwa diperkirakan jumlah penduduk di daerah pegunungan tengah itu ada 600 ribu orang meliputi 20 kabupaten.

Apabila pembangunan infrastruktur berjalan baik, lanjut dia, maka kehidupan mereka pasti tak terisolasi lagi. Ia menilai percepatan pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian dan informasi akan cepat berfungsi.

“Semoga target program infrastruktur transportasi UP4B hingga tahun 2014 ini mampu mencapai 20 kabupaten kota yang selama ini terisolasi dapat terwujud, yang dimulai dari pegunungan tengah sampai pesisir pantai,” kata dia.

Dengan tersedianya transportasi darat,

**“Tak usahlah kita membahas persoalan konflik sampai berlarut-larut. Sebab, persoalan konflik itu ada faktor ketidakpuasan di masyarakat bawah. Nah, persoalan ketidakpuasan itu yang harus kita penuhi,”**

udara dan laut disertai dibukanya pelabuhan, terminal, dan bandara, maka diharapkan masyarakat Papua bisa menikmatinya dan gejala kekecewaan itu pun jauh berkurang.

“Salah satu yang membuat mereka kecewa karena persoalan diskriminasi pembangunan dan kesejahteraan. Apalagi, selama ini, sebagian besar masyarakat Papua masih terisolasi pembangunan yang membuat mereka merasa terasing dari NKRI,” kata dia.

Amir tidak sependapat jika dikatakan program UP4B dengan program Otsus Papua saling terjadi tumpang tindih. Justru, menurutnya, terjadi sinergisitas yang baik. Kedua program ini, lanjut dia, akan mempercepat pembangunan Papua sampai tingkat Kabupaten.

“Saat ini, dana APBD setiap kabupaten baru paling rendah sebesar 700 Milyar dan yang paling tinggi hingga mencapai 1,2 triliun rupiah,” ungkap dia.

Menurutnya, ada dua alasan berkenaan adanya anggapan yang mengatakan bahwa agenda otonomi khusus itu gagal. Pertama, ekspektasi mereka terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Kedua, mungkin saja mereka terlalu resisten. Dia menilai, ditengah alam demokrasi, dua alasan ini dianggap wajar saja.

Amir pun tak terlalu menyalahkan pemberitaan media yang beragam terkait konflik Papua. Sekalipun begitu, ada baiknya media jangan hanya fokus pemberitaan tentang konflik saja, namun fakta kemajuan juga mesti sering diberitakan. Semisal, pada tahun 2001, putra-putri Papua sangat minim studi di luar Papua. Kini, sejak adanya program Otsus Papua, jumlah mereka yang studi ke luar Papua hingga ke luar negeri mencapai lima kali lipat.

“Saat ini, kami pun sudah mengagendakan program khusus beasiswa pendidikan dari pemerintah untuk 1000 orang setiap tahun untuk studi di luar pulau Papua. Selain itu, kami mengadakan program ikatan dinas pendidikan dengan sekolah pemerintahan seperti Sekolah Tinggi Akutansi Negara, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, dan masih banyak lagi program UP4B untuk meningkatkan SDM Papua,” papar dia.

Dia berharap stigma bahwa masyarakat Papua adalah golongan kelas dua, harus dihapuskan. Bila masih ada pandangan seperti itu, dia menilai sangat menyesatkan dan membunuh karakter orang Papua.

“Masyarakat Papua adalah warga kelas satu karena sumber daya alamnya sangat melimpah. Pun menteri dari orang Papua juga sudah ada, partisipasi politik dan demokrasi juga sudah berjalan pesat,” tandasnya.

*Victor / Andreas Hutagalung*

